

BAB I

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN MUTU DAN NILAI TAMBAH PENGOLAHAN GABAH/BERAS

Prof. Dr. Djoko Said Damardjati

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

1. PENDAHULUAN

Salah satu aspek terpenting dalam pengembangan sistem agribisnis padi/ perberasan adalah penanganan pasca panen (pengolahan) gabah/beras. Hal ini terkait dengan masalah kehilangan hasil yang cukup tinggi, mutu hasil yang rendah dan harga gabah/ beras yang fluktuatif/ tidak stabil. Permasalahan tersebut berakibat adanya kecenderungan tidak memberikan insentif kepada petani untuk memperbaiki tingkat pendapatannya. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah telah berusaha meningkatkan produksi padi dan mengurangi tingkat kehilangan hasil (losses) yang terjadi pada kegiatan panen, pasca panen, baik yang berupa kehilangan bobot (kuantitatif) maupun berupa penurunan mutu dan kerusakan fisik (kehilangan kualitatif).

Padi/ gabah yang kadar airnya tinggi mempunyai sifat mudah rusak dan busuk baik pada waktu panen, perontokan, pengeringan, penyimpanan/ penggudangan, pengolahan, dan atau pada saat distribusi. Oleh karena itu, perlu penanganan pasca panen yang cepat dan tepat. Dengan penanganan pasca panen yang baik diharapkan kualitas produk gabah/beras akan tinggi serta tetap terjaga dengan baik dari produsen sampai ke konsumen akhir.

Kegiatan penanganan pasca panen di Indonesia mulai diwujudkan sejak peringatan Hari Pangan Sedunia II, tanggal 16 Oktober 1982, dimana Menteri Pertanian mencanangkan Gerakan Penyelamatan Produksi Pangan melalui usaha-usaha perbaikan penanganan pasca panen dan pengolahan di tingkat petani/pedesaan. Gerakan tersebut selanjutnya diikuti dengan diterbitkannya beberapa kebijakan pemerintah, baik dalam bentuk Keppres No. 47 tahun 1986 maupun berupa peraturan-peraturan penyediaan sarana dan prasarana pasca panen termasuk pendidikan dan pelatihan serta koordinasi antar instansi terkait.

Pada periode tersebut, penanganan pasca panen dan pengolahan diarahkan untuk melestarikan swasembada pangan khususnya beras. Namun dengan adanya perubahan lingkungan strategis pasar global, maka penanganan pasca panen hasil pertanian dituntut untuk dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing. Penanganan pasca panen yang baik akan menguntungkan semua pihak, baik petani, pelaku usaha, masyarakat maupun pemerintah. Bagi petani dan pelaku usaha, penanganan pasca panen yang baik akan mendapatkan hasil lebih banyak, masyarakat sebagai konsumen akan memperoleh gabah/beras yang berkualitas dan bagi pemerintah ketahanan pangan nasional bertambah mantap yang pada gilirannya akan mendukung perekonomian nasional.

2. PERMASALAHAN PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN GABAH/BERAS

Perkembangan penanganan pasca panen gabah/beras hingga dewasa ini masih berjalan lambat dan masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari lambatnya perkembangan penggunaan/penerapan sarana dan teknologi pasca panen gabah/beras. Dampak yang terlihat antara lain masih tingginya tingkat kehilangan hasil yang mencapai 20,51%, mutu dan nilai tambah yang masih rendah. Hal ini disebabkan antara lain karena berbagai masalah yang dihadapi dalam pengembangan penanganan pasca panen, baik masalah teknis, manajemen, sosial maupun ekonomi.

2.1. Masalah Teknis

Masalah teknis yang dihadapi meliputi :

1. Tingkat pengetahuan dan kesadaran petani dan pelaku usaha akan pentingnya penerapan sarana dan teknologi pasca panen masih sangat terbatas.

2. Kurangnya tenaga terampil (*technical skill*) dalam mengoperasikan sarana pasca panen mulai dari panen, perontokan, pengeringan, penggilingan dan penyimpanan serta pemasaran (distribusi).
3. Penyebaran sarana pasca panen masih sangat terbatas terutama di tingkat petani/kelompok tani.
4. Dukungan unit pelayanan jasa alat mesin (UPJA) pasca panen, lumbung desa modern (LDM), penggilingan padi serta perbengkelan untuk perbaikan, perawatan dan penyediaan suku cadang sarana pasca panen masih rendah. Hal ini disebabkan akses permodalan di tingkat petani/kelompok tani masih terbatas.
5. Introduksi beberapa sarana dan teknologi pasca panen belum sesuai dengan kebutuhan petani/kelompok tani dan belum bersifat lokal spesifik.
6. Belum tersedianya infrastruktur seperti jalan usahatani yang memadai sehingga menyulitkan petani/kelompok tani, dan UPJA untuk mengoperasionalkan sarana pasca panen padi.
7. Kurangnya tenaga pembina, penyuluh dan pendamping yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang memadai di lapangan dalam penanganan pasca panen padi.

2.2. Masalah Sosial

Masalah sosial yang dihadapi antara lain :

1. Kebiasaan petani dalam melakukan kegiatan pasca panen sebagian besar masih secara tradisional sehingga menyulitkan dalam penerapan sarana dan teknologi pasca panen yang baik dan benar sesuai prosedur operasional standar (POS).
2. Kebutuhan uang tunai yang mendesak, menyebabkan petani cenderung mengijonkan atau menebaskan seluruh hasil panen kepada pedagang pengumpul/tengkulak atau pengusaha penggilingan padi, sehingga keseluruhan kegiatan pasca panen dilakukan oleh pedagang atau pengusaha penggilingan padi tersebut.
3. Hubungan antara pemilik lahan dan buruh tani serta pemanen pada daerah tertentu hanya sebatas hubungan pekerjaan, sehingga tidak punya peranan dalam penentuan sarana dan teknologi pasca panen yang akan digunakan.

2.3. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi yang dihadapi meliputi :

1. Daya beli petani/kelompok tani dan unit pelayanan jasa alsin (UPJA) serta lumbung desa modern (LDM) terhadap sarana alat mesin pasca panen masih rendah, sehingga permintaan sewa sarana alat mesin pasca panen juga relatif rendah.
2. Harga sarana alat mesin pasca panen relatif tinggi sehingga kurang layak untuk diusahakan di daerah.
3. Belum tersedianya skim kredit khusus untuk pengadaan sarana alat mesin pasca panen padi.
4. Kemampuan petani untuk menyewa jasa sarana alat mesin pasca panen masih rendah, sehingga menghambat perkembangan penggunaan/penerapan sarana pasca panen di daerah.

3. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Ruang Lingkup

Kebijakan pemerintah dalam peningkatan mutu dan nilai tambah pengolahan beras/gabah harus didukung oleh aspek legal. Pada tahun 1986, telah diterbitkan Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1986 tentang "Peningkatan Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian". Kekuatan hukum yang lain dalam penanganan pasca panen tertuang pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang "Sistem Budidaya Tanaman". Dalam Undang-Undang tersebut dikemukakan tujuan panen dan pasca panen yang mencakup (a) menekan tingkat kehilangan dan/atau kerusakan, (b) meningkatkan mutu, (c) memperpanjang daya simpan, (d) meningkatkan daya guna, dan (e) nilai tambah serta daya saing. Dukungan aspek legal terakhir adalah Inpres No. 13 tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan yang mencakup: (a) memberi dukungan peningkatan produktivitas, kualitas, dan produksi padi nasional termasuk pemanfaatan sumberdaya lahan dan air dalam rangka peningkatan pendapatan petani, (b) memberi dukungan bagi diversifikasi kegiatan ekonomi petani padi dalam rangka peningkatan pendapatan petani, (c) memberikan dukungan kebijakan bagi pengembangan penanganan pasca panen gabah/beras guna meningkatkan kualitas dan mengurangi kehilangan hasil, (d) melaksanakan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) dengan pedoman sebagai berikut : (1) harga pembelian gabah kering panen (GKP) sebesar Rp. 1.730,- per kilogram di penggilingan, (2) harga pembelian gabah kering giling sebesar Rp. 2.280,- per kilogram di gudang, Rp. 2.250,- per kilogram di

penggilingan, (3) harga pembelian beras sebesar Rp. 3.550,- per kilogram di gudang penyimpanan.

3.2. Kebijakan Operasional

Kebijakan operasional, secara terfokus diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

3.2.1. Upaya penyelamatan hasil

Dalam upaya mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing gabah/beras salah satu kebijakan yang ditempuh adalah upaya penyelamatan hasil dari kehilangan dan kerusakan pada waktu panen dan pasca panen. Mengingat bahwa tingkat kehilangan hasil padi/ gabah tertinggi terjadi pada tahap panen, dan perontokan serta menurunnya mutu hasil karena proses pengeringan dan penyimpanan, maka kebijakan operasional pada saat ini lebih dititik-beratkan pada tahapan tersebut. Dengan penyelamatan hasil diharapkan produksi yang dihasilkan akan lebih banyak, dan mutu akan lebih baik yang pada gilirannya akan tercipta nilai tambah dan daya saing yang makin kuat. Program dan kegiatan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang mendukung upaya penyelamatan hasil untuk peningkatan mutu dan nilai tambah gabah/beras antara lain adalah : (a) menyusun peta perwilayahan panen padi; (b) sosialisasi gerakan pelayanan penanganan pasca panen padi; (c) Penumbuhan dan pengembangan kecamatan pasca panen padi; (d) mendorong penggunaan terpal (*terpalisasi*) untuk perontokan dan pengeringan serta penggadaan alat mesin perontok (*thresher*) dan alat mesin pengering (*dryer*); (e) Mengoptimalkan pemanfaatan UPJA, LDM dan penggilingan padi; (f) dan lain-lain.

3.2.2. Upaya Peningkatan Mutu

Peningkatan mutu gabah/beras terus diupayakan agar petani mendapatkan nilai tambah dalam mengelola usahanya, dan tidak hanya menjual hasil panen sebagaimana biasanya. Peningkatan mutu gabah/beras sejalan dengan era pasar bebas yang menuntut jaminan mutu yang baik, dan aman untuk dikonsumsi serta halal. Peningkatan mutu dapat dilakukan dengan peningkatan perbaikan penanganan pasca panen melalui perontokan, pengeringan, penyimpanan/ penggudangan dan pada akhirnya terciptanya adanya sistem agroindustri industri beras berlabel.

Untuk mencapai mutu gabah/beras yang baik diperlukan adanya standarisasi mutu dan penerapannya di lapangan, sehingga jaminan mutu gabah/beras dapat dilakukan secara obyektif dan ada jaminan bagi konsumen untuk memperoleh

gabah/beras yang benar-benar bermutu. Perbaikan mutu gabah/beras harus dimulai sejak pra panen/ budidaya, panen, pasca panen, pengolahan, sampai dengan pemasaran. Oleh karena itu, perlu adanya sistem jaminan mutu dalam penerapan proses produksi, penanganan pasca panen (pengolahan) padi yang konsisten dan berkelanjutan.

3.2.3. Kebijakan dan Strategi

Faktor-faktor kunci penanganan pasca panen (pengolahan) dalam mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing gabah/beras di masa yang akan datang antara lain :

a. Aspek Kebijakan

Selama ini keberpihakan pada kegiatan penanganan pasca panen (pengolahan) gabah/beras masih tertinggal apabila dibandingkan dengan kegiatan pra panen atau budidaya. Oleh karena itu, diharapkan adanya suatu kebijakan nasional yang ditetapkan untuk meningkatkan partisipasi dari semua pihak (*stakeholder*) guna menangani masalah pasca panen (pengolahan) gabah/beras secara menyeluruh dan berkesinambungan.

b. Koordinasi Lintas Sektoral

Pengembangan penanganan pasca panen (pengolahan) gabah/beras ke depan tidak dapat dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, pendekatan koordinasi antar kelembagaan terkait yang telah dirintis perlu ditingkatkan mulai di tingkat pusat, daerah hingga tingkat petani/kelompok tani dan pelaku usaha. Koordinasi tersebut dimaksudkan antara lain untuk menkoordinasikan dan mensinkronisasikan program dan kegiatan perbaikan penanganan pasca panen (pengolahan), agar dapat memberikan hasil, manfaat dan dampak yang maksimal dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing gabah/beras.

c. Aspek Sarana dan Teknologi

- (i) Meningkatkan peran sarana dan teknologi pasca panen (pengolahan) melalui penambahan jumlah sarana alat mesin pasca panen yang masih sangat terbatas. Dalam penambahan sarana alat mesin pasca panen tersebut perlu memperhatikan jenis dan jumlah yang secara teknis dan ekonomi secara layak untuk diusahakan/dikembangkan serta kondisi sosial dan lingkungan yang memungkinkan. Dalam pengembangan sarana alat

mesin pasca penen (pengolahan) gabah/beras tersebut pemerintah diharapkan dapat menyediakan fasilitas kredit dengan tingkat suku bunga rendah dan persyaratan lunak.

- (ii) Kaji terap sarana alat mesin pasca panen (pengolahan) gabah/beras inovasi baru yang dihasilkan oleh pabrikan, lembaga penelitian maupun perguruan tinggi yang telah direkomendasikan oleh lembaga berwenang perlu terus dilakukan di lapangan dan disosialisasikan kepada pengguna jasa sarana alat mesin pasca panen (pengolahan) gabah/beras.
- (iii) Pengkajian kebutuhan riil sarana alat mesin pasca panen (pengolahan) secara spesifik di masing-masing lokasi/daerah.
- (iv) Pemasyarakatan penggunaan sarana alat mesin pasca panen (pengolahan) melalui kampanye dan demonstrasi serta gelar teknologi pasca panen (pengolahan) gabah/beras.
- (v) Mendorong UPJA, LDM, penggilingan padi, pabrikan alat mesin pasca panen, distributor, perbengkelan dan petani/kelompok tani untuk dapat bekerjasama dan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan.
- (vi) Pada tahun 2007, Departemen Pertanian akan menyediakan dana pembayaran uang muka untuk pengadaan sarana alat mesin pasca panen bagi petani/ kelompok tani.

Mutu sarana alat mesin pasca panen seyogyanya betul-betul terjamin karena itu *Good Handling Practices (GHP)*, *Good Manufacturing Practices (GMP)*, *Good Distribution Practices (GDP)* harus diterapkan dalam memproduksi sarana alat mesin pasca panen (pengolahan) gabah/beras baik oleh pabrik maupun bengkel/ pengrajin alat mesin pasca panen (pengolahan) gabah/beras. Hal yang juga penting adalah harga jual alat mesin pasca panen (pengolahan) gabah/beras hendaknya dapat terjangkau oleh petani/kelompok tani, UPJA, LDM dan penggilingan padi, serta jaminan purna jual dari produsen harus ditepati agar pengguna sarana alat mesin pasca panen (pengolahan) gabah/beras tidak mendapatkan kesulitan apabila memerlukan suatu suku cadang.

d. Aspek Kelembagaan

Dalam penanganan pasca panen (pengolahan) gabah/beras, petani/kelompok tani, UPJA, LDM, penggilingan padi dan stake holder dihimpun dalam organisasi yang disebut kecamatan pasca panen. Kecamatan pasca panen adalah lembaga/ organisasi petani di suatu wilayah kecamatan sentra produksi padi yang petaninya sudah dapat menerapkan sarana alat mesin pasca panen (pengolahan) gabah/ beras secara optimal sehingga dapat menurunkan kehilangan hasil dan

meningkatkan mutu gabah/beras agar petani/kelompok tani dan *stake holder* mampu meraih nilai tambah daya saing dan meningkatkan pendapatannya.

e. Aspek Sumber Daya Manusia

Peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) diarahkan untuk meningkatkan sikap/perilaku, pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan pengembangan kewirausahaan (*entrepreneurship*), manajemen serta kemampuan perencanaan usaha di bidang agribisnis padi. Dengan adanya peningkatan mutu SDM ini diharapkan penggunaan/penerapan sarana alat mesin pasca panen dan pengolahan akan meningkat dan areal yang dapat ditangani akan terus bertambah. Peningkatan mutu SDM dilakukan melalui pelatihan/kursus, kerjasama dengan lembaga pelatihan seperti perguruan tinggi, magang di perusahaan yang telah maju. Sedangkan pelatihan dilakukan baik kepada petani/kelompok tani, penyuluh, petugas pembina maupun para pengelola sarana alat mesin pasca panen dan pengolahan gabah/beras.

f. Aspek Permodalan

Kelembagaan petani yang menangani penanganan pasca panen (pengolahan) gabah/beras pada umumnya lemah dalam hal permodalan. Untuk itu perlu diupayakan adanya skim kredit dengan persyaratan yang mudah, suku bunga Tendah dan dapat dijangkau oleh petani/kelompok tani, unit pelayanan jasa alat mesin pertanian (UPJA), lumbung desa modern (LDM), penggilingan padi, bengkel/ pengrajin yang membutuhkan modal tersebut. Untuk memfasilitasi petani/kelompok tani terhadap kredit/pembiayaan, Departemen Pertanian telah meluncurkan program pengembangan skim pelayanan pembiayaan pertanian (SP-3). Tujuan utama program pengembangan SP-3 ini adalah untuk membantu kemudahan akses petani/kelompok tani pada layanan kredit/pembiayaan dari perbankan melalui mekanisme bagi resiko dan pelayanan jasa penjaminan bagi petani/kelompok tani yang tidak mempunyai agunan yang cukup. Pada tahun 2007, pemerintah akan meningkatkan alokasi dana penjaminan sampai dengan 1 (satu) trilyun rupiah. Dengan dana penjaminan ini diharapkan tersedia kredit bagi petani/kelompok tani paling tidak sebesar 5 (lima) trilyun rupiah. Disamping itu pemerintah pada tahun 2007 juga akan memberikan subsidi bunga kredit sebesar minimum 5% lebih kecil dari bunga komersil.

4. PROGRAM AKSI

Menyadari permasalahan dan hambatan yang terjadi, maka upaya untuk meningkatkan mutu dan nilai tambah pengolahan gabah/beras dapat dilakukan melalui penerapan sarana dan teknologi pasca panen dan pengolahan dalam

upaya mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing gabah/beras nasional. Program aksi yang dilakukan di tingkat pusat dan daerah meliputi berbagai aktifitas kegiatan antara lain :

1. Penyusunan SK Menteri Pertanian tentang Pembentukan Forum Koordinasi Peningkatan Penanganan Pasca Panen.
2. Penyusunan SK Menteri Pertanian tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pasca Panen.
3. Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) Penanganan Pasca Panen padi.
4. Membentuk POKJA untuk membantu dan menggerakkan kegiatan penanganan pasca panen (pengolahan) di tingkat pusat dan daerah gabah/beras.
5. Melakukan Gerakan Pelayanan Penanganan Pasca panen Padi.
6. Penumbuhan dan Pengembangan Kecamatan Pasca Penen Padi.
7. Inventarisasi pewilayahpanen padi (waktu, luas dan produksi).
8. Inventarisasi jumlah, jenis dan kondisi alat mesin pasca panen (pengolahan) gabah/beras.
9. Pengadaan alat mesin pasca panen (pengolahan) gabah/beras seperti terpal, sabit bergerigi, alat mesin perontok (thresher), alat mesin pengering (*dryer*), dan penggilingan padi melalui dana tugas pembantuan (tahun 2006 sebesar Rp. 212 M).
10. Mendorong daerah (Propinsi, Kabupaten/ Kota) mengoptimalkan alat mesin pasca panen (pengolahan) gabah/beras yang telah ada tetapi belum atau tidak digunakan secara optimal.
11. Mengoptimalkan pemanfaatan UPJA, LDM, Penggilingan Padi, dan memberdayakan Forum Kecamatan Pasca Panen Padi.
12. Melakukan Bimbingan Teknis dan Manajemen Penanganan Pasca panen dan Pengolahan Gabah/Beras.
13. Memantau pengadaan/ pembelian gabah/beras yang bermutu sesuai permintaan pasar (BULOG).
14. Monitoring dan Evaluasi.

5. PENUTUP

Program penanganan pasca panen (pengolahan) gabah/beras untuk menurunkan kehilangan hasil, meningkatkan mutu dan nilai tambah melalui penerapan sarana dan teknologi pasca panen merupakan upaya yang strategis. Dengan penerapan sarana dan teknologi pasca panen (pengolahan) gabah/beras yang tepat dan bijaksana, akan memberikan peluang yang cukup besar dalam upaya meningkatkan nilai tambah, daya saing dan pendapatan petani.

Di masa mendatang penerapan sarana dan teknologi pasca panen (pengolahan) gabah/beras perlu mendapatkan perhatian yang serius baik oleh instansi pemerintah, swasta maupun petani/ pelaku usaha (*stake holder*), sehingga pengembangan sarana dan teknologi pasca panen (pengolahan) gabah/beras tidak saja berorientasi pada penyelamatan hasil tapi juga diarahkan untuk meningkatkan mutu, nilai tambah dan daya saing gabah/beras.

Diperlukan komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari seluruh stake holders dalam penanganan pasca panen (pangolahan) gabah/beras guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.